

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan Penyelenggara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kota Payakumbuh berdasarkan sumber dana iurannya dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 1. Pengelolaan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran dengan Sumber Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Pengelolaan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran dengan Sumber Dana berasal dari *sharing* antara Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Payakumbuh (JKSS) 3. Pengelolaan Kepesertaan Non Penerima Bantuan Iuran/Mandiri.
2. Pengelolaan Kepesertaan pada ketiga kelompok ini dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, Secara umum pengelolaan berjalan cukup baik. Permasalahan-permasalahan pengelolaan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk Penerima Bantuan iuran tidak berjalan optimal karena terkendala kurangnya sumber daya manusia dan anggaran sehingga data yang tersedia untuk penerima bantuan iuran ini diragukan kevalidannya.
 - b. Penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKSS hanya berdasarkan pendapatan saja, tidak ada aturan yang lebih teknis mengenai kriteria penerima bantuan iuran JKSS ini, sehingga jumlah masyarakat yang tergabung dalam PBI JKSS ini begitu banyak melebihi jumlah PBI APBN sehingga berpotensi melakukan pemborosan anggaran dilain sisi pemerintah kota Payakumbuh mengalami devisa anggaran yang cukup besar.
 - c. Pengelolaan kepesertaan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan untuk penerima bantuan iuran masih kurang optimal terbukti dengan adanya

ganda kepesertaan sehingga diharuskan melakukan adendum kontrak, begitu juga dengan pengelolaan kepesertaan mandiri perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong keinginan masyarakat untuk bergabung dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

3. Karakteristik yang mempengaruhi kepesertaan BPJS Kesehatan ada empat komponen yaitu, Pendidikan, penghasilan, pekerjaan dan jumlah anggota keluarga. Semakin tinggi pendidikan maka kepedulian akan kesehatan akan semakin tinggi sehingga akan mendorong untuk bergabung dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Begitu juga halnya dengan penghasilan semakin tinggi penghasilan semakin besar kesempatan untuk bergabung dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar akan memberi peluang yang lebih besar pula sebaliknya pekerjaan dengan penghasilan yang relatif kecil akan memberi peluang yang kecil pula dalam kepesertaan. Lain halnya dengan jumlah anggota keluarga semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin kecil kesempatan kepesertaan, sebaliknya semakin kecil jumlah anggota keluarga maka akan semakin besar kesempatan untuk bergabung dalam keanggotaan BPJS Kesehatan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran dalam pengelolaan kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato di Payakumbuh terutama berkaitan dengan akurasi penerima bantuan iuran sehingga benar-benar tepat sasaran.
2. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kriteria penerima bantuan iuran dengan sumber dana APBD tidak hanya berpedoman pada penghasilan saja tapi lebih diatur secara teknis kriteria penerima bantuan iuran tersebut.
3. Perlu dilakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang menjadi penunjang pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan ini seperti kegiatan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan tenaga Kerja baik dari segi anggaran maupun pemenuhan terhadap sumber daya

manusia pelaksana kegiatan sehingga kegiatan ini dapat berjalan lebih optimal.

4. Dalam rangka meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri, BPJS Kesehatan diharapkan dapat melakukan pengembangan kegiatan yang dapat mengakselerasi pencapaian kepesertaan, baik yang bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui SKPD teknis seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, PKK maupun kegiatan yang dilakukan sendiri oleh BPJS Kesehatan.
5. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini masih terbatas pada komparasi karakteristik antara peserta mandiri dan yang belum bergabung dalam kepesertaan. Oleh karena itu penelitian bisa diperdalam lagi untuk mendapatkan analisis yang lebih dalam dengan variabel dan metode penelitian yang lain terutama untuk karakteristik/variabel lama pendidikan. Oleh karena itu, studi lanjutan perlu dilakukan sehubungan dengan saran tersebut sehingga hasilnya bisa lebih baik lagi.

